

Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Penanaman Karakter Pancasila Dikalangan Siswa Di Kota Makassar

Heri Tahir¹, Ririn Nurfaathirany Heri², St. Junaeda³, Maya Kasmita⁴, Muh. Rizal⁵

^{1,2,4,5} Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

³ Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Heri Tahir

E-mail: heri.tahir@unm.ac.id

Abstrak

Kenakalan remaja dan kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda tersinyalir telah meresahkan masyarakat, semisal kasus kekerasan sesama pelajar, pencurian, kasus asusila seperti free sex, pemerkosaan, perampokan disertai kekerasan, bahkan pembunuhan. Pendidikan Pancasila merupakan pondasi awal untuk menanamkan kesadaran hukum yang baik bagi anak. Sehingga pendidikan pancasila kemudian menjadi mata pelajaran wajib sejak di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Menengah Atas. Kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) serta kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin merebak. Kasus kekerasan di sekolah Sudah terjadi sejak dulu, namun seiring perkembangan tekhnologi, kasus keekrasan disekolah semakin marak dan dipublikasikan oleh para pelaku kekerasan sebagai bentuk kebanggaan diri yang secara nyata sangat menyimpang dari nilai-nilai pancasila. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat penting untuk dapat dilakukan diseminasi kepada siswa untuk dapat menanamkan kesadaran hukum dan karakter Siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun target luaran yang diharapkan dalam penyuluhan/pengabdian kepada masyarakat ini adalah hadir serta meningkatnya kesadaran hukum dan karakter Siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, testing, penyuluhan, dan evaluasi. Berhasilnya kegiatan ini dapat dilihat dari antusiasme peserta yang menjadi indikator keberhasilan yang dihitung sebagai faktor pendukung.

Kata kunci – Kenakalan Anak, Karakter pancasila, Kesadaran Hukum

Abstract

Juvenile delinquency and crimes committed by the younger generation have allegedly disturbed society, such as cases of violence between students, theft, immoral cases such as free sex, rape, robbery accompanied by violence, and even murder. Pancasila education is the initial foundation for instilling good legal awareness in children. So that Pancasila education then becomes a mandatory subject from elementary school, middle school and high school. Juvenile delinquency and crimes committed by children are increasingly widespread. Cases of violence in schools have been happening for a long time, but along with the development of technology, cases of violence in schools are becoming more common and are being publicized by perpetrators of violence as a form of self-pride which clearly deviates from the values of Pancasila. Based on this background, it is very important to carry out dissemination to students to instill legal awareness and student character based on Pancasila values. The expected output target in this outreach/community service is the presence and increase in legal awareness and student character based on Pancasila values. The methods used in implementing this service are observation, testing, counseling and evaluation. The success of this activity can be seen from the enthusiasm of the participants which is an indicator of success which is counted as a supporting factor.

Keywords – Child Delinquency, Pancasila Character, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila merupakan pondasi awal untuk menanamkan kesadaran hukum yang baik bagi anak. Sehingga pendidikan pancasila kemudian menjadi mata pelajaran wajib sejak di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Menengah Atas. Secara umum, tujuan utama pendidikan pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran huku, sikap dan perilaku cinta tanah air dan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri siswa.

Secara khusus, tujuan pancasila terkandung dlam tujuan pendidikan nasional, yakni : meningkatkan manusia yang berkualitas, ber Imtak, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat berkebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi ke masa depan. Tujuan pendidikan pancasila tidak bisa lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia serta tujuan pendidikan nasional. Ketiganya diikat menjadi berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan sila-sila pancasila.

Yohana dan Dinie menegaskan Bahwa Banyaknya terjadi penyimpangan /kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu sendiri. Maka dari itu pentingnya memahami pancasila tidak hanya mengerti namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai pendidikan karakter. beliau juga mengemukakan bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia saat ini. Membina dan mendidik karakter, dalam arti untuk membentuk "positive character" generasi muda bangsa ini. Agar positive character terbentuk, maka perlu pembiasaan "mandiri, sopan santun, kreatif dan tangkas, rajin bekerja, dan punya tanggung jawab"

Kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) serta kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin merebak. Kasus kekerasan di sekolah Sudah terjadi sejak dulu, namun seiring perkembangan teknologi, kasus keekrasan disekolah semakin marak dan dipublikasikan oleh para pelaku kekerasan sebagai bentuk kebanggaan diri yang secara nyata sangat menyimpang dari nilai-nilai pancasila. Beberapa siswa di Kota Makassar yang mengalami kasus kekerasan bahkan mengalami trauma dan takut untiuk kembali ke sekolah. Kasus penganiayaan yang terjadi di sekolah salah satunya dialami oleh siswa yang kemudian kejadian tersebut di netralisir, sehingga tindakan pengulangan kasus kekerasan yang tidak menjadi perhatian serius akan menjadi benih kejahatan bagi pelaku kekerasan yang tidak mendapatkan arahan dengan tegas namun mendidik.

Kasus kekerasan yang terjadi di sekolah menjadi cerminan bahwa pemahaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila belum sepenuhnya dapat dipahami siswa dengan baik. harus mendapatkan perhatian lebih khusus dan intens karena berdasarkan data dinas perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan yang terjadi di Kota Makassar didominasi oleh kasus kekerasan yang melibatkan anak.

Kejahatan pada kalangan generasi muda telah menjadi penyakit ganas di tengah-tengah masyarakat, mengingat generasi muda merupakan generasi pemegang tampuk pemerintahan negara di masa depan. Lebih parah, berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda tersinyalir telah meresahkan masyarakat, semisal kasus pencurian, kasus asusila seperti free sex, pemerkosaan, perampokan disertai kekerasan, bahkan pembunuhan. Kasus-kasus yang tergolong berat tersebut dilakukan oleh generasi muda tidak hanya terbatas pada latar belakang ekonomi maupun kultur lingkungan, namun juga banyak dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang yang membuat generasi muda manjadi hilang akal dan terbilang nekat untuk melakukan tindak kejahatan.

Secara materil, masyarakat maupun perseorangan kerap kali terpaksa harus menjadi korban, yakni kerugian materil maupun inmateril. Masyarakat maupun perseoranagn sering merasa tidak aman, ketenteraman hidup tidak terjamin, bahkan kedamaian nyaris tidak terwujud.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat penting untuk dapat dilakukan diseminasi kepada siswa untuk dapat menanamkan kesadaran hukum dan karakter Siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun target luaran yang diharapkan dalam penyuluhan/pengabdian kepada masyarakat ini adalah hadir serta meningkatnya kesadaran hukum dan karakter Siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

METODE

Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, testing, penyuluhan, dan evaluasi. Secara rinci, uraian teknik pelaksanaan dan tujuan dari masing-masing tahapan diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap observasi

Pada tahap ini dilakukan observasi terhadap jenjang pendidikan, umur, dan keseharian anak. Hal tersebut dilakukan agar penyuluhan yang dilakukan dapat efektif.

b. Tahap testing

Pada tahap ini diuji kemampuan dasar anak mengenai pengetahuan mengenai narkoba Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyampaikan materi.

c. Tahap penyuluhan

Pada tahap ini dilakukan penyuluhan berdasarkan hasil dari observasi dan testing. Penyuluhan ini dirancang dalam dua seshon yakni seshon teoretik dan seshon praktikum. Pada seshon teoretik dilakukan kegiatan berupa penyampaian materi tentang konsep, tujuan dan dasar, sistematika. Pada seshon praktikum dilakukan kegiatan berupa games pengetahuan-pengetahuan yang penting bagi anak dalam memahami materi yang diberikan.

d. Tahap evaluasi

Pada tahap ini dilakukan kegiatan evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyuluhan yang telah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan berupa tes penguasaan materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum realisasi penyelesaian Masalah yang dilakukan oleh tim pengabdian melalui penyuluhan hukum :

A. Pembukaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Aula Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Makassar pada Hari Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 09.00 - 12.00 Wita. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan pembukaan, materi, diskusi, follow up materi, dan evaluasi. Kegiatan pembukaan dengan keynote speech Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Makassar, pemberian materi kegiatan oleh Prof. Dr. Heri Tahir SH., MH. Kemudian dilanjutkan Oleh Dr. Maya Kasmita, S.STP.,M.A.P dan St. Junaeda, S.Pd., M,M, M.Pd Follow Up Materi oleh Tim pengabdian Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, S.H.,M.H.dan dilanjutkan dengan evaluasi dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bentuk realisasi penyelesaian masalah, dilaksanakan dengan lancar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 yang melibatkan beberapa Guru dan pegawai, 50 orang Siswa/siswi, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni :

1. Tahap pertama. berupa kegiatan analisis permasalahan mitra melalui kegiatan diskusi dengan guru dan siswa. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan mitra dan perencanaan kegiatan bersama Kepala Sekolah dan Guru dengan persetujuan kerja sama yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Makassar.



Gambar 1.

Kegiatan bersama Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Makassar

2. Tahap ke-dua. Merupakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan di Aula Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Makassar.



Gambar 2.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di (SMK) Negeri 5 Makassar

3. Tahap ke-tiga. Merupakan tahapan evaluasi kegiatan yang melibatkan Siswa/siswi, Guru dan tim pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 3.

Kegiatan Evaluasi Kegiatan

4. Tahap ke-empat. Merupakan tahapan penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat. Terkait realisasi penyelesaian masalah, dilaksanakan penyuluhan sekaligus konsultasi terkait problematikan yang dialami oleh guru dan Siswa oleh Tim penyuluh yang memiliki multi keilmuan dalam ilmu hukum, baik hukum Pidana, kriminologi, Sosiologi Antropologi, maupun Administrasi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Publik mampu memberikan solusi terkait problematika yang terjadi di masyarakat serta memberikan pemahaman yang memadai sehingga masyarakat paham dan dapat mengambil sikap terkait masalah dan problematika yang hadir.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Aula Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 pada Hari Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 09.00 - 12.00 Wita. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan pembukaan, materi, diskusi, follow up materi, dan evaluasi. Kegiatan pembukaan dengan Kegiatan pembukaan dengan keynote spech Kepala Sekolah ekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Makassar, pemberian materi kegiatan oleh Prof. Dr. Heri Tahir SH., MH. Kemudian dilanjutkan Oleh Dr. Maya Kasmita, S.STP.,M.A.P dan St. Junaeda, S.Pd., M,M, M.Pd Follow Up Materi oleh Tim pengabdian Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, S.H.,M.H.dan dilanjutkan dengan evaluasi dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

C. Penyajian Materi

Pada tahap ini, narasumber dari tim Pengabdian Masyarakat menyampaikan materi sebagai solusi dan masukan terhadap problematika/masalah yang dihadapi oleh mitra selama 3 x 60 menit, dengan estimasi pembagian waktu 90 menit pertama untuk penyampaian materi, 60 menit kedua diskusi dan tanya jawab, serta 40 menit terakhir sebagai followup materi sekaligus upgrading.

Pendidikan karakter berbasis pancasila dimulai dengan pengertian terkait karakter itu sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (2008) menyebutkan bahwa karakter adalah "sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain". Pada definisi ini karakter adalah ciri pembeda antara satu orang dengan orang yang lain, ciri itu bukan terletak pada hal-hal fisik (warna kulit, lurus atau keritingnya rambut, dll.), melainkan pada sifat-sifat kejiwaan atau pada akhlaknya. Pada makna kata karakter ini ada masalah mendasar, apakah kejiwaan itu bersifat permanen (ada begitu saja dalam diri seseorang sedari lahirnya) atau bentukan (bisa diubah, diperbaharui, karena itu dapat dilatihkan)? Bila sifat sebagai aksiden (sesuatu yang menempel atau ditempelkan pada yang inti), karakter adalah hasil bentukan yang bisa berubah-ubah, bergantung pada pembentuknya (lingkungan atau kebiasaan). Namun, bila sifat merupakan sesuatu yang niscaya ada bersama dengan adanya seseorang, karakter merupakan "bawaan lahir" yang tidak bisa diubah-pada titik ini pendidikan karakter menjadi sia-sia.



Gambar 4.
Materi Kegiatan

Selain terkait karakter pancasila sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum, siswa juga diberikan bekal terkait publik speaking sebagai sarana peningkatan kepercayaan diri yang bernilai positif serta materi terkait keberanian untuk berbicara dan mengatakan kebenaran apabila mendapatkan perilaku buruk dari orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan diseminasi kepada siswa untuk dapat menanamkan kesadaran hukum dan karakter Siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini dianggap sukses dan berhasil. Program Kemitraan Masyarakat ini terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama yang baik antara pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Makassar khususnya Siswa/Siswi, guru, Kepala Sekolah dan seluruh jajarannya. Serta dukungan dari Universitas Negeri Makassar sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Berhasilnya kegiatan ini dapat dilihat dari antusiasme peserta yang menjadi indikator keberhasilan yang dihitung sebagai faktor pendukung. Kegiatan ini dikatakan berhasil karena dapat dilihat pada beberapa hal berikut:

- a. Peserta yang diharapkan hadir melebihi target, dan melebihi kapasitas fasilitas yang di sediakan.
- b. Melihat antusiasme peserta yang hadir, maka kegiatan ini dianggap sangat menarik dan dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Kegiatan diskusi, tanya jawab yang dilakukan diakhir kegiatan menunjukkan antusias yang baik.
- d. Kegiatan kuis yang dilakukan sebagai penutup kegiatan menunjukkan adanya penambahan pengetahuan terhadap Guru dan siswa terkait materi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartini Kartono, 1986, Psikologi Sosial 2. Jakarta: Rajawali.
- _____, 2008. Kenakalan Remaja. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- _____, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
- Made Darma, Weda, 1996, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurgiansah, T. H., & Al Muchtar, S. (2018). Development of Student Awareness through Student Learning Model Jurisprudential in Citizenship Education. ATLANTIS PRESS, 251(Acec), 670–674. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.150>
- Wagiati, Soetodjo, 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
- W.A. Gerungan. 2004. Psikologi sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Willis, Sofyan, 2008. Remaja dan Masalahnya. Bandung: Alfabeta.
- Yohana.R.U.Sianturi & Dinie Anggraeni Dewi(2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai Pendidikan karakter. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No.1 Juni 2021 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.